

---

**Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni****Faustina C. C. Patiran****Adolf Z. D. Siahay****Paulus K. Allo Layuk****Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih****ABSTRACT**

*This study aims to analyze the factors that affect the effectiveness of regional financial management. Factors affecting the effectiveness of regional financial management are measured by variables of human resource quality, functional supervision, regional financial information system and internal control system. The research approach used is associative. The sampling technique used in this study is purposive sampling with a total of 115 respondents at the OPD and the Teluk Bintuni Regency Inspectorate. Data collection was carried out by distributing questionnaires. Data analysis uses multiple linear regression with the help of SPSS. This study show results that human resources, functional supervision, regional financial accounting system, and internal control system affect the effectiveness of regional financial management in the Teluk Bintuni Regency Regional Government.*

*Keywords: human resource competence, functional supervision, regional financial accounting system, internal control system*

**1. PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari pengelolaan keuangan negara, pada dasarnya adalah bagian dari sistem keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Teluk Bintuni, masih menghadapi tantangan dalam mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya. Masih adanya temuan yang signifikan dalam pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan yang besar dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, konteks geografis dan sosial-ekonomi Kabupaten Teluk Bintuni juga perlu diperhitungkan dalam analisis ini. Faktor-faktor seperti infrastruktur yang terbatas, akses terhadap sumber daya manusia yang terbatas, serta perubahan regulasi yang cepat juga dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini berarti bahwa masih terdapat banyak tantangan yang perlu diatasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang lebih baik. Berdasarkan laporan BPK, sejumlah temuan signifikan terkait pengelolaan keuangan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta masalah ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Analisis mendalam tentang faktor-faktor ini di Kabupaten Teluk Bintuni diperlukan untuk memberikan wawasan yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi dan untuk mengembangkan

rekomendasi konkret. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja administrasi keuangan daerah, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah tersebut. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas akan berkontribusi pada integritas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik di Indonesia.

Melalui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Teluk Bintuni, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat guna untuk meningkatkan kinerja administrasi keuangan daerah. Upaya ini bertujuan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah tersebut, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling* yang termasuk dalam *non probability sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.

Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Auditor Fungsional Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Kepala OPD, Bidang Perencanaan dan PPK-SKPD pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Data diolah menggunakan aplikasi SPSS 21.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan pengujian secara parsial pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia diperoleh hasil nilai thitung  $2.355 > 1,659$  dengan signifikansi  $0,024 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa H1: Diterima, Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Salah satu faktor yang mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah adanya sumber daya manusia yang kompeten pada bidangnya. Hal sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di OPD Kabupaten Teluk Bintuni, dimana kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Khafiza & Subadriyah, 2023; A. M. Putri et al., 2023; Simatupang, 2017) yang memberikan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai sehingga diprediksi akan mempengaruhi kinerja termasuk dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pentingnya sumber daya manusia dalam pelaporan keuangan pemerintah adalah mencegah kegagalan dalam penyusunan laporan sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Hidayakh et al., 2020).

### Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan pengujian secara parsial pada variabel Pengawasan Fungsional diperoleh hasil nilai thitung  $4,832 > 1,659$  dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa H2: Diterima,

Pengawasan Fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Inspektorat memiliki peran penting sebagai pengawas fungsional intern pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, inspektorat daerah melakukan pengawasan fungsional intern yaitu seluruh kegiatan audit, review, evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukura yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pertanggungjawabannya (Wulandari, 2013).

Inspektorat Provinsi sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di daerah, yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Daerah telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah (Masruroh, 2011). Hasil penelitian (Putri et al., 2023; Utami, 2016) menyatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan pengujian secara parsial pada variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diperoleh hasil nilai thitung  $2,702 > 1,659$  dengan signifikansi  $0,008 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa H3: Diterima, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Handayani et al., 2022; W. M. Putri & Arza, 2019). SAKD merupakan prosedur paling berhubungan yang disusun sesuai skema yang menyeluruh untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang digunakan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan ekonomi (Khafiza & Subadriyah, 2023).

Penelitian (Putri et al., 2023; Simatupang, 2017) memberikan hasil bahwa sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini berarti semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah yang dimiliki dalam suatu instansi maka akan semakin tinggi juga tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan. Dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai dengan efektif dan efisien sehingga pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan pada akhirnya dapat mengalokasikan dana yang tersedia untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

### **Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan pengujian secara parsial pada variabel Sistem Pengendalian Internal diperoleh hasil nilai thitung  $4,685 > 1,659$  dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa H4:

Diterima, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu sistem yang dapat mewujudkan pelaksanaan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang mencakup segala aspek organisasi dan dapat menyeimbangkan bagian organisasi maupun kepentingan yang ada dalam organisasi. Efektivitas secara umum diartikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Dengan adanya pengendalian intern pemerintah maka seluruh proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisiensi untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Utami, 2016). Hasil penelitian (Injilita, 2017; Khafiza & Subadriyah, 2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah

#### 4. PENUTUP

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, F., Sari, D. M., & Yuniarti, A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1).
- Hidayakh, E., Rahayu, S., & Gowon, M. (2020). Determinan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(2), 80–89.
- Injilita, S. G. (2017). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.
- Khafiza, L., & Subadriyah. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 12(1), 486–494. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i1.500>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun. (2006). *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah. (2008). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. *Per UU*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Putri, A. M., Suriyanti, L. H., & Hastanto, A. M. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ekobistek*, 12(1), 486–494. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i1.500>

- Putri, W. M., & Arza, F. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 1(3).
- Simatupang, M. S. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan). *JOM Fekon*, 4(1), 2017.
- Utami, N. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kinerja Pegawai, Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *JOM Fekon*.
- Wulandari, I. (2013). *Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintahan Kota Padang*. Universitas Negeri Padang.